

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan pembangunan tersebut bermaksud untuk meningkatkan kualitas hidup suatu negara dalam rangka menciptakan kehidupan akan lebih baik bagi masyarakatnya Tujuan peningkatan kualitas hidup adalah untuk memberdayakan masyarakat agar dapat menghasilkan ide-ide yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Pengembangan sumber daya manusia sangat penting dalam menciptakan tenaga kerja yang produktif. Pembangunan adalah perubahan yang nantinya akan terjadi dalam dimensi kehidupan penduduk akan berubah.

Pembangunan itu diharapkan oleh masyarakat sebagaimana untuk memenuhi segala kebutuhan hidup. Alhasil tidak semua orang dapat memenuhi kebutuhannya. Orang-orang dalam kondisi yang tidak menguntungkan, seperti kemiskinan, masih ada. Hal tersebut terjadi disebabkan adanya masyarakat yang menolak untuk memperbaiki kehidupannya. Kemiskinan itu terjadi dikarenakan akibat kesenjangan sosial. Tereksposnya kemiskinan seringkali terkait dengan masalah sosial yang lain. Contohnya anak terlantar, gelandangan, pengemis keluarga dengan rumah tidak layak untuk ditinggali, pelacur, penganggran, kriminalitas, dan rendahnya tingkat kesehatan.

Beginilah kondisi yang dapat dirasakan bagi Indonesia. Meskipun pertumbuhan Indonesia sebagai negara berkembang, banyak orang yang hidup dalam kemiskinan. Masalah kemiskinan selalu menjadi penghambat kehidupan yang sejahtera. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 28 juta warga negara yang hidup dalam kemiskinan di Indonesia dari 237 juta penduduk Indonesia. Artinya 4.444 penduduk hidup miskin di Indonesia. Mengingat banyaknya jumlah

penduduk miskin di Indonesia, kita perlu menyikapi dengan signifikan. Penanganannya melibatkan keterlibatan banyak sisi, termasuk pemerintah, dunia bisnis dan penduduk.

Seperti yang kita sadari jika kebutuhan mempengaruhi tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang mencakup kebutuhan fisik, mental, sosial bahkan dunia lain. Jika diperhatikan lebih dalam diketahui bahwa tidak terpenuhinya tempat tinggal yang pantas bagi mereka. Hal tersebut bersua sebab mereka untuk memenuhi penginapan yang terhormat karena keadaan keuangan yang negative. Sehubungan dengan siapa pun yang peduli tentang mereka yang masih terbatas untuk mengisi rumah yang layak. Oleh sebab itu, mereka kesulitan pada saat pembuatan rumah dengan model yang tidak wajar.

Bagi orang miskin, rumah tersebut dimanfaatkan sebagai tempat tinggal tanpa mempertimbangkan kewajarannya dari segi fisik, mental dan sosial. Kelemahan mereka untuk mengatasi masalah penginapan yang bagus secara langsung relatif terhadap gaji mereka dan informasi tentang kemampuan rumah yang sebenarnya. Diharapkan ini akan memiliki saran untuk mengabaikan kerabat, dan selain ketidakmampuan ramah Kondisi ini mampu dimiliki bagi penduduk miskin di negara ini. Dimana keadaan rumah yang ditinggali bagi kaum miskin di negara ini bisa dibidang tidak layak untuk ditinggali.

Potret demikian menerangkan betapa bahayanya perseturuan sosial yang timbul pada masyarakat jika saja pemenuhan kebutuhan hunian yang layak huni ini tidak bisa diatasi. Oleh karena itu, perhatian pemerintah harus diberikan pada rumah-rumah yang tak layak tinggali. Pemerintah memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab melindungi seluruh penduduk Indonesia dengan menyediakan bangunan yang layak ditempati. Hal ini harus dilakukan agar masyarakat dapat hidup dan tinggal di rumah yang layak serta dapat dijangkau pada tempat tinggal yang bersih,

aman. Menjamin kelestarian terhadap sekitar dan mewujudkan masyarakat sejahtera yang sejalan bersamaan semangat demokrasi dan otonomi daerah.

Hak pertunjukan dasar bagi masyarakat Indonesia ialah dengan memiliki rumah yang layak huni. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28H UUD 1945 sebagai akibat dari Perubahan IV, maka dinyatakan jika “Rumah adalah salah satu hak dasar setiap rakyat Indonesia, maka setiap warga Negara berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Semua orang Indonesia wajib mempunyai tempat tinggal. Bangunan tersebut merupakan kebutuhan pokok manusia untuk meningkatkan harkat, kualitas hidup dan penghidupan, serta merupakan tindakan cerminan pribadi individu dalam meningkatkan taraf hidup dan terwujudnya terbentunya kepribadian, kepribadian serta kepribadian bangsa.

Bagi masyarakat rumah berfungsi untuk mengatur kehidupan sehari-hari. Rumah memiliki fungsi yang sangat baik. Memiliki rumah dapat melindungi seseorang atau sekelompok orang dari beberapa jenis bahaya. Begitupun ketika fungsi suatu tempat tinggal dijadikan sebagai proses mewujudkan bidang psikologis dan edukatif. Dari segi psikologis, kehadiran sebuah rumah memberikan kenyamanan dan memungkinkan setiap orang di dalam rumah untuk bekerja dengan bebas dan fokus pada kondisi yang mereka rasakan. Fungsi pendidikan adalah sebagai wadah untuk membina keluarga baik dari segi mental, fisik maupun kepribadian.

Sebagai penyelenggara pemerintahan, Pemerintah siap sedia untuk mengembangkan program yang akan ditujukan untuk mengatasi masalah kemiskinan melalui pemberdayaan dan keberlanjutan. Program pemerintah antara lain adalah dukungan yang menarik bagi perusahaan berkembang seperti contoh Program Nasional Mandiri Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), atau Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dengan dukungan uang tunai. Perumahan yang layak akan tercipta bila

pemerintah mendukung dengan maksimal. Sebagai contoh, pada tahun 2011 pemerintah melaksanakan Program Rehabilitasi Sosial Perumahan Tidak Layak Huni (RS-RTLH) melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia.

RS-RTLH merupakan suatu program rumah tangga miskin (RTM) karena rumahnya tak memenuhi standar perumahan. Dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan taraf hidup mereka dan memiliki perumahan yang sesuai standar dengan cara yang benar. Kegiatan tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat miskin melalui pelatihan mandiri dan menghindari konsekuensi pelatihan mandiri dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penghargaan dalam negeri, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan APBD Kota/Kabupaten serta berbagai sumber mata air aset yang tidak membatasi.

Pada kegiatan ini tidak hanya membidik bagian rumah yang sebenarnya, namun yang lebih signifikan adalah sarana yang digunakan untuk membangun batas perkumpulan fakir miskin ini untuk memahami dan memahami arti dari tempat yang bagus untuk tinggal dan perspektif sosial dalam iklim keluarga. Apalagi ketika dieksekusi di lapangan, harapannya rasa ketabahan sosial dan jiwa partisipasi bersama di mata publik mulai kabur. Apalagi kehadiran hal tersebut, nantinya bisa membantu mengurangi tantangan pada keluarga yang kekurangan untuk dapat tempat tinggal yang dapat dihuni dengan baik.

Pemangku pelaksanaan latihan Program RS-RTLH pada daerah Kementerian Sosial Republik Indonesia merupakan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan. Dalam pemrogramannya, penyaluran sebuah bantuan untuk program RS-RTLH memiliki 2 tujuan antara lain, ialah bantuan kepada penduduk miskin di daerah pelosok, serta bantuan kepada penduduk miskin di kota-kota besar.

Masalah kemiskinan di Indonesia perlu segera ditanggulangi, terutama daerah-daerah yang sulit untuk dijangkau pemerintah secara berkala, endemic kemiskinan yang memandang bangsa Indonesia sebagai akibat dari sekumpulan dosa sosial atas perilaku tak adil pemerintah. Bahkan angka kemiskinan berulang kali diperhitungkan secara detail. Sementara itu, kemiskinan dan kesejahteraan merupakan hak paling dasar dari semua warga negara. Bulan Maret 2019 tercatat 9,41% penduduk kurang mampu dari total jumlah penduduk Indonesia.

Tabel 1.1

“Tabel Kemiskinan Diberbagai Tingkatan”

NO	WILAYAH	BULAN	TAHUN	PRESENTASE
1	Indonesia	Maret	2019	9,41%
		Maret	2020	12,82%
2	Pedesaan	September	2019	12,60%
		Maret	2020	12,82%
3	Perkotaan	September	2019	9,86%
		Maret	2020	11,16%
4	Jawa Tengah	September	2020	11,84%
		Maret	2021	11,79%
5	Kabupaten Semarang	Maret	2019	7,04%
		Maret	2020	7,51%
6	Desa Kawengen	Maret	2021	29,0%
				71,0%

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Kemiskinan adalah urusan termasuk sangat berat bahkan pembangunan memengaruhi pada negara, bahkan negara maju pun tengah mempunyai sekelompok kemiskinan. Dimana masalah perumahan sama halnya sebagai salah satu dari sekian banyak hal yang mampu dipakai untuk menempatkan patokan kemiskinan, dimana rumah yang tak layak huni tersebut ditempati oleh penduduk miskin. Kemiskinan menjadi faktor paling penting pada saat banyak penduduk penduduk Desa Kawengen yang totalnya mencapai 2000 lebih jiwa.

Kemiskinan dapat dimengerti sebagai kurang sejumlah dana serta persediaan untuk jaminan proses kelangsungan hidup. Bagi BPS, kemiskinan adalah tidak mampu seseorang untuk memudahkan mendapat kebutuhan dasar minimum untuk kehidupan yang layak. Kemiskinan berada pada bawah garis standar kebutuhan terendah baik pangan maupun non pangan dikenal dengan garis kemiskinan atau garis kemiskinan.

Oleh karena itu, menurut BKKBN, kemiskinan adalah suatu kondisi di mana kemampuan untuk dapat terpenuhinya suatu kebutuhan hidup yang layak, contohnya pendapatan, kesehatan, keterampilan, pengelolaan aset keuangan, dan terbatasnya akses informasi, menjadi terbatas. Namun, menurut peraturan daerah Jawa Tengah, kemiskinan merupakan kondisi perekoekonomi individu serta kelompok masyarakat sebab tidak memenuhi kebutuhan dasar agar dapat mempertahankan bahkan mengembangkan aktivitas akan manfaatnya.

Kabupaten Semarang ialah satu dari 26 Kabupaten sebab terdapat pada provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Semarang memiliki jumlah penduduk adapun cukup banyak selain itu memiliki penduduk yang cukup banyak Kabupaten Semarang juga memiliki RTLH yang masih lumayan tinggi. Garis kemiskinan di Kabupaten Semarang sejumlah Rp. 377.647, sedangkan untuk presentase kemiskinan di Kabupaten Semarang sebesar 7,04%, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Semarang juga masih terbilang tinggi yaitu sebesar 73.903 jiwa. Selain itu tingkat RTLH di

Kabupaten Semarang sendiri dibagi sebanyak 3 prioritas yaitu prioritas pertama sebesar : 36 rumah tangga, prioritas kedua sebesar : 23,323 rumah tangga, dan prioritas ketiga sebesar : 21,283 rumah tangga.

Rumah ialah hunian yang termasuk kebutuhan pokok bahwa hal tersebut harus dimiliki setiap penduduk. Peran penting bagi rumah terhadap seorang individu ataupun jika keluarga. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 mengenai Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebutkan bahwasanya tempat tinggal ialah bangunan gedung karena fungsinya merupakan suatu hunian yang pantas, sarana menghidupi keluarga, gambaran harkat serta martabat penghuni dan tak lain aset untuk seseorang yang memilikinya. Menurut Undang – Undang di atas, rumah harus menjadi tempat tinggal sebab layak dan tidak hanya sebagai tempat berteduh tetapi juga sebagai sarana pemenuhan kesejahteraan mental dan sosial untuk dapat melindungi privasi pada setiap anggota keluarga, serta melaksanakan kepemimpinan dan pendidikan keluarga.

Realitas mewujudkan rumah layak huni bukanlah tugas yang mudah. Masyarakat yang tidak dapat terpenuhinya kebutuhan akan rumah yang layak berbanding lurus terhadap pendapatan masyarakat serta ilmu mengenai fungsi rumah itu. Oleh karena itu, satu dari beberapa parameter untuk menentukan kemiskinan adalah situasi rumah yang tak layak huni. Sehingga, masalah infrastruktur lingkungan yang tidak memadai dapat menghambat pencapaian kepentingan umum. Lingkungan kumuh atau infrastruktur lingkungan yang minim dapat menimbulkan masalah kesehatan dan sosial.

Sebagaimana disebutkan, sangat penting bagi pemerintah Indonesia untuk secara serius mempertimbangkan dan menangani masalah perumahan tidak layak huni itu sendiri. Dalam hal ini, Kementerian Sosial sampai dengan memenuhi kebutuhan rumah layakk huni bagi fakir miskin, adanya kenyamanan meninggal kediaman, meningkatkan harkat tak lupa martabat keluarga fakir

miskin, memperkuat kemampuan keluarga sebagai halnya memenuhi peran dan fungsinya sebagai pemberi perlindungan dan pendidikan sekaligus bimbingan dan kualitas hidup yang meningkat. Pada aturan pelaksanaannya, pemerintah pusat yang tengah bekerjasama dengan beberapa daerah, termasuk provinsi bahkan kabupaten/kota.

Kabupaten Semarang memiliki banyak rumah tidak layak huni, sehingga rumah tidak layak huni menjadi permasalahan strategis dan sangat perlu untuk diamati oleh Pemerintah Kabupaten Semarang. Perkara strategi merupakan sebuah analisa yang memperkuat lingkungan luar dengan mengidentifikasi kondisi yang diperlukan melalui hasil Isu-isu yang akan terus dihadapi dengan mengidentifikasi kondisi ataupun hal-hal yang harus dipertimbangkan ataupun diusulkan pada rencana untuk pembangunan lima tahun terakhir dan untuk dampak yang signifikan bagi daerah/masyarakat di masa depan.

Dengan menghadapi permasalahan rumah tidak layak huni di Kabupaten Semarang, Pemerintah Kabupaten Semarang sejak tahun 2010 sudah melakukan berbagai macam program Bantuan Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni, yang pada dasarnya program itu merujuk pada program BSPS yang dirancang dengan Pemerintah Pusat. Program tersebut merupakan layanan yang menarik memungkinkan orang tidak mampu untuk pindah ketempat yang lebih layak untuk ditinggali. Membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah yang layak merupakan tujuan dari program Rehab RTLH.

Desa Kawengen merupakan satu dari 26 Kabupaten di Jawa Tengah, kayu menjadi pokok utama untuk membuat rumah di desa tersebut, dan beralaskan tanah, adapula rumah penduduk yang menyatu dengan kandang hewan peliharaannya. Kegiatan Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di desa mempunyai suatu tujuan supaya beberapa masalah kemiskinan teratasi, ketersediaan bangunan layak tinggal, kenyamanan yang didapat saat tinggal di tempat tersebut,

meningkatkan kemampuan keluarga pada saat memainkan peran sekaligus perlindungan yang merupakan fungsi keluarga terhadap satu sama lain, dan meningkat harkat dan martabat masyarakat.

Tabel 1.2
Data Kependudukan Desa Kawengen

NO	NAMA	JUMLAH
1	Kependudukan	L: 607 P: 579
2	KK	L: 2086 P: 401
3	Usia	L: 25-29 tahun P: 20-24 tahun
4	Agama	Muslim : 981 orang
5	Pekerjaan	Pensiunan: 974 jiwa Pelajar : 1711 jiwa PNS : 790 jiwa Tidak bekerja : 361 jiwa Rumah tangga : 47 jiwa
6	Kesejahteraan	Individu : 3,19 ribu
7.	IDM	Berkembang
8	RTLH	Intervensi : 121 KK/ 29,0% Sisa : 296 KK/ 71,0%

Sumber: Website Kecamatan Ungaran Timur

Untuk menuju kehidupan yang sejahtera, perhatian khusus harus diberikan pada masalah program subsidi sub-perumahan. Sebenarnya, dengan mewujudkan rumah yang untuk memenuhi standar syarat yang harus dipenuhi tidaklah hal yang gampang untuk masyarakat Kawengen. Ketertarikan untuk menyikapi persoalan tersebut harus terus ditumbuhkan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Dasar hukum pelaksanaan Program Restorasi Rumah Tidak Layak Huni Desa Kawengen adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/2016 tentang Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya dan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Sosial. Dukungan terhadap rehabilitasi rumah tak layak huni untuk penduduk berpendapatan rendah di Kabupaten Semarang nomor 42 tahun 2017.

Permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan dalam pelaksanaan Program Yayasan Yudisial Program Restorasi Rumah Tidak Layak Huni Desa Kawengen yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/2016 tentang Keberdayaan Diri -membantu stimulan perumahan, serta Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Bantuan Sosial Pemulihan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Semarang Nomor 42 Tahun 2017.

Masalah pelaksanaan Program Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Desa Kawengen, Program tersebut masih memiliki sejumlah persoalan, di antaranya persoalan pembangunan program bersyarat yang ditemukan dalam pelaksanaan pembangunan dalam Program Bantuan Perumahan Tidak Layak Huni (RTLH) Desa. Kawengen yang berhubungan mengenai program tersebut diantaranya yaitu : belum berjalanya program sesuai dengan apa yang diinginkan, hal

tersebut dapat diketahui melalui proses pembangunan RTLH tersebut banyak dijumpai sebagian rumah yang tak siap.

Alhasil kegiatan pelaksanaan Pembangunan Program Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Desa Kawengen dalam proses pembangunannya terlihat lama serta masyarakat yang mengeluh tak bukan merasa kecewa mengenai pelaksanaan program rumah tak layak huni itu tak segera selesai, atau bahkan adapun rumah masih belum jadi atau setengah jadi namun sudah ditempati. Tetapi, hal tersebut nyatanya belum bisa dikatakan berhasil 100% karena banyaknya sebagian bangunan yang belum terpasang. Barang-barang yang diperlukan tidak ada sebab belum dikirim oleh pihak yang mengurus pembelianya. Pelaksanaan program bantuan rumah tidak layak huni di Desa Kawengen tersebut juga terlihat berbasis pada proyek atau kepentingan pribadi oleh pihak pelaksana.

Pelaksanaan program bantuan perumahan tidak layak huni di desa Kawengen juga tampaknya didasarkan pada kepentingan pribadi proyek atau pemangku kepentingan. Masalah ini tentunya merupakan masalah yang harus segera diselesaikan karena dapat berdampak buruk terhadap pelaksanaan rehabilitasi sosial (RS-RTLH) perumahan tidak layak huni di Desa Kawengen. Tak lain masalah umum yang disebutkan di atas, beberapa gejala yang terkait dengan pelaksanaan program bantuan perumahan tidak sesuai untuk perumahan. Desa Kawengen yang dihadiri banyak warga melakukan protes karena merasa target bantuan tidak mencukupi dan bukan yang terbesar, sehingga rumah tidak dibangun sesuai harapan.

Perbandingan antara desa-desa yang ada di Kecamatan Ungaran salah satunya yaitu Desa Kawengen dengan Desa Mluweh. Menurut data yang saya lihat di lokasi antara Desa Kawengen dengan Desa Mluweh terdapat perbedaan seperti akses jalan untuk menuju ke Desa Kawengen masih rusak dan akses jalan yang hampir longsor, sedangkan akses untuk menuju ke Desa

Mluweh sudah jalan yang cor. Selain perbedaan di akses jalan Desa Mluweh lebih maju daripada Desa Kawengen karena rumah penduduk di Desa Mluweh sudah dapat dikatakan layak huni semua karena tidak ada lagi rumah warganya yang menyatu dengan kandang peliharaan mereka. Masyarakat di Desa Mluweh juga mudah untuk diajak kerjasama karena mereka juga ingin memiliki rumah yang layak untuk mereka tinggali, selain itu di Desa Mluweh juga sudah terdapat lampu penerangan jalan, sedangkan di Desa Kawengen hanya beberapa saja jalan yang ada lampu penerangannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam penelitian ini penulis akan meneliti tentang Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Di Desa Kawengen Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang dalam mengatasi Kemiskinan.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut deskripsi di atas hingga dapat di rumuskan suatu masalah sebagai berikut

1. Bagaimana implementasi program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Desa Kawengen yang dilakukan pemerintah desa?
2. Faktor apa saja yang akan menjadi penghambat dalam implementasi program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Desa Kawengen?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian setelah memahami pokok masalah yang nantinya akan diteliti maka tujuannya ialah untuk tahu akan implementasi yang dilaksanakan Pemerintah Desa Kawengen melalui Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dan untuk mendeskripsikan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Desa Kawengen. Lalu untuk dapat mengetahui apa saja faktor penghambat dalam implementasi program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di desa kawengen.

1.3 Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1.3.1 Kegunaan Teoritis

Penggunaan Teoritis mengacu pada kontribusi pada saat melaksanakan penelitian melalui pengembangan teori serta ilmu pengetahuan di dunia akademis.

- a. Penelitian tersebut harap dapat memengaruhi sebuah gagasan ide bagi pengembangan pemikiran ilmiah melalui bidang kesejahteraan masyarakat serta pembangunan.
- b. Sebagai referensi serta pedoman bagi pemerintah Desa Kawengen lainnya dalam rangka usaha yang nantinya dapat dicapai masyarakat sekaligus hal itu dalam situasi sosial dan ekonomi.

1.3.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis mengacu pada kontribusi praktis yang diberikan dalam penyenggaraan penelitian terhadap obyek penelitian .

- a. Memperoleh data serta kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Semarang pada saat melakukan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) alhasil program tersebut dijalankan sangat tercapai sesuai tujuan yang ingin dicapai.

b. Penelitian tersebut digunakan sebagai suatu informan pelengkap untuk dapat memberikan ide maupun gagasan sekaligus alternative lain untuk meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan melalui program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH).

1.4 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian berikut, penulis memaparkan penelitian sebelumnya terkait dengan permasalahan yang nantinya diteliti dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial rumah tak layak ditempati.

Penelitian terdahulu menurut peneliti sebelumnya

NO	PENELITI	METODOLOGI	LOKUS	TEMUAN UTAMA	KELEMAHAN	KEUNGGULAN
1	Nur Rosita Tri Kusumuwati 2017 Peran Asosiasi Peternak Sapi Indonesia (ASPIN) Boyolali Dalam Pemberday	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. metode ini digunakan untuk menjelaskan fenomena sedalam-dalamnya	Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali	Asosiasi ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para ternak sapi potong dengan memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat	Ada hambatan dalam mengkoordinasi pengurus dan kelompok peternak sapi karena kesibukan setiap individu dan banyaknya anggota kelompok	ASPIN Boyolali memiliki tujuan untuk membantu masyarakat peternak sapi potong dalam mensejahterakan dirinya melalui pembinaan, pendampingan. Keberadaan ASPIN Boyolali dalam memberdayakan kelompok telah banyak terlihat.

	<p>aan Masyarakat di Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali</p>	<p>informasi melalui pengumpulan data tentang fakta yang ada dilapangan (Kriyantono,2006)</p>				
2	<p>Asna Aneta 2010 Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Kota Gorontalo.</p>	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus.</p>	<p>Kota Gorontalo</p>	<p>Hasil temuan adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan, mengetahui dan menganalisis tingkat keberterimaan masyarakat</p>	<p>Kurang keterlibatan masyarakat dalam mengatasi kemiskinan</p>	<p>Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan di kota Gorontalo. Komunikasi, Sumber daya, Sikap pelaksana dan struktur birokrasi merupakan faktor yang dialami pada penelitian serta pada realitasnya dapat dukungan terhadap</p>

				terhadap kebijakan program penanggulangan kemiskinan		pelaksanaan seluruh tahapan pada program.
3	Nano Prawoto 2009 Memahami kemiskinan dan Strategi Penanggulagannya	Metode yang digunakan dalam penelitsn ini adalah kualitatif	Indonesia a	Hasil temuan adalah untuk mengatasi masalah kemiskinan yang memang telah lama menjadi problema	Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam membantu pemerintah untuk mengurangi kemiskinan	untuk mengetahui implementasi dari program pemugaran rumah tidak layak huni yang bertujuan membantu menanggulangi kemiskinan.
4	Siti Mubaroqah 2014 Implementasi Program Pembangunan Rumah Tidak	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan analisis secara kualitatif	Desa Sangat an Utara	Implementasi program pembangunan RTLH di Desa Sanggata Utara	Masih kurangnya pemerintah dalam menjalankan program pembangunan rumah layak	Implementasi program pembangunan rumahlayak huni di Desa Sanggata Utara hasilnya cukup baik dengan melalui proses panjang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan yang dilakukan oleh

	Layak Huni di Desa Sanggatan Utara				huni di desa Sanggata Utara	pelaku didesa, kecamatan hingga kabupaten serta penduduk dengan manfaat yang akan diterima.
5	Lawungni Nastiti 2014 Implementasi Program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Magetan	Penelitian ini menggunakan metode gabungan antara kualitatif dan kuantitatif dengan metode deskriptif	Kabupaten Magetan	Masalah yang dihadapi masyarakat miskin di Kabupaten Magetan adalah terbatasnya perumahan yang layak huni .	mengetahui strategi pemenuhan perumahan dan permukiman bagi masyarakat miskin untuk pelaksanaan strategi nasional penanggulangan kemiskinan terkhusus dalam bidang perumahan	adalah untuk mengetahui penanggulangan kemiskinan melalui program pemugaran rumah tidak layak huni

Sumber: Skripsi tentang Rumah Tidak Layak Huni

Dari hasil penelitian terdahulu, terlihat bahwa memiliki beberapa persamaan maupun perbedaan. Menggunakan teori Implementasi, adapun persamaan pada skripsi ini dengan beberapa hasil penelitian terdahulu. Bahkan, satu lagi kedekatan terhadap eksplorasi ini adalah membidik Rumah yang Tidak Dapat Dihuni. Sementara itu, lokasi penelitian menjadi salah satu perbedaan

pada skripsi ini. Dimana area penelitian skripsi ini dilakukan di Desa Kawengen Kabupaten Semarang, sementara itu lokasi penelitian dari hasil penelitian terdahulu yaitu di Kabupaten Boyolali, Kota Gorontalo, di Desa Sanggatan Utara, dan Kabupaten Magetan.

1.5 Kajian Teori

1.6.1 Administrasi Publik

Administrasi secara etimologis berasal dari Bahasa Inggris yang artinya, *administration* atau *to administear* yang berarti mengelola (*to manage*) atau menggerakkan (*to direct*). Tulis menulis, surat menyurat merupakan artian administrasi dalam arti sempit yaitu kegiatan tata usaha seperti. Arti administrasi secara luasnya menurut Siagian yang dikutip oleh Pasolong dari bukunya Teori Administrasi Publik (2011:3) mengatakan: “Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha kerjasama demi tercapainya tujuan yang di tentukan sebelumnya”.

Menurut pengertian diatas dapat disimpulkan, Administrasi adalah suatu usaha kerja sama antara dua orang atau bahkan lebih dalam mencapai suatu kegiatan kerjasama dua orang atau lebih untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Karena manusia tidak bisa bekerja sendiri dan merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, maka administrasi dan kehidupan sehari-hari tidak dapat dipisahkan untuk mencapai suatu tujuan.

Perkembangan penelitian administrasi publik ditandai dengan munculnya berbagai pendekatan dan teori. Pendekatan dan teori yang berbeda ini umumnya diadopsi dari berbagai disiplin ilmu selain administrasi publik. Ilmu politik, ekonomi, sosiologi, psikologi, hukum, administrasi bisnis, dll. Sebagian besar masalah administrasi muncul yang bersumber mengenai masyarakat. Administrasi publik ialah suatu sistem yang menjawab pernyataan-pernyataan ini. Gerald Caiden

(dalam Miftah Toha, 2008: 7) menekankan, bahwa disiplin administrasi publik ini pada dasarnya ialah sebuah disiplin yang menanggapi masalah pada kegiatan perlakuan masalah-masalah pada masyarakat (*public affairs*), serta manajemen dari kegiatan-kegiatan masyarakat (*public business*).

Sedangkan pengertian administrasi publik menurut Felix A. Nigro dan Lloyd G. Nigro di antaranya yaitu:

- a) Suatu kerja sama kelompok dalam lingkungan politik pemerintah.
- b) Meliputi ketiga cabang pemerintahan yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif serta hubungan di antara mereka.
- c) Mempunyai peran penting dalam perumusan kebijakan pemerintah, dan sebab itu ialah sebagian dari proses politik.
- d) Sangat erat kaitannya tentang berbagai acuan kelompok swasta dan perorangan saat menerangkan program pelayanan terhadap masyarakat.
- e) Dalam beberapa hal berbeda pada penempatan pengertian dengan administrasi perseorangan.

Chandler dan Plano (1988:29) juga mengemukakan bahwa administrasi publik itu sendiri merupakan sebuah proses pengorganisasian serta koordinasi sumber daya untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan dan kebijakan publik. Disini mereka juga menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu (*art and science*) yang bertujuan untuk mengatur kebijakan public untuk memecahkan suatu masalah publik yang terjadi dalam satu atau lain organisasi.

Maka dari itu, menurut para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Administrasi Publik ialah kajian ilmu sosial yang mengkaji 3 unsur penting kehidupan berbangsa antara lain lembaga

legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi, kebijakan publik, manajemen publik, tujuan negara, administrasi pembangunan, dan etika yang mengatur penyelenggara negara.

1.6.1.2 Paradigma Administrasi Publik

Ilmu pengetahuan atau teori merupakan bantuan/temuan manusia. Dari dasar itulah sangat wajar apabila suatu teori mengalami perubahan atau penyempurnaan. Seperti halnya agama teori atau ilmu pengetahuan ditemukan di masyarakatnya adalah untuk mengatasi masalah di masa itu juga. Teori muncul dari analisa yang dilakukan pada kejadian-kejadian yang telah berlangsung atau analisa yang dilakukan untuk menjawab kejadian yang telah berlangsung. Perkembangan atau perubahan suatu teori biasanya disebabkan karena ilmu atau teori yang ada dianggap sudah tidak relevan dan tidak bisa menjawab keadaan masalah yang muncul di masyarakat pada waktu tertentu. Perkembangan itu biasa disebut sebagai paradig. American Heritage Dictionary merumuskan paradig sebagai serangkaian asumsi, konsep, nilai-nilai, dan praktek-praktek yang diyakini oleh suatu komunitas dan menjadi cara pandang suatu realitas. Sedangkan menurut Thomas Khun dalam buku yang berjudul "*The structure of scientific revolution*" memaknai paradigma adalah suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar, atau cara memecahkan suatu masalah yang dianut oleh suatu masyarakat ilmiah pada masa tertentu.

Administrasi publik merupakan ilmu pengetahuan yang dinamis dan telah mengalami perubahan dan pembaharuan dari waktu ke waktu sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Paradigma yang muncul merupakan sudut pandang ahli tentang peranan dan tantangan administrasi publik dalam menjawab masalah yang muncul. Walaupun selalu muncul perdebatan dalam sebuah paradigma akan tetapi secara umum para ahli menilai ada empat perkembangan paradigma administrasi. Dalam beberapa literatur administrasi publik dari dalam maupun luar negeri secara umum terdapat empat paradigma yang berkembang dalam administrasi publik yaitu

: *Old Public Administration (OPA)*, *New Public Administration (NPA)*, *New Public Management (NPM)*, *New Public Services (NPS)*.

Old Public administration

Paradigma administrasi public dimulai dengan *Old Public Administration* atau Administrasi Public Lama. Paradigma Administrasi Negara Lama dikenal juga dengan sebutan Administrasi Negara Tradisional atau Klasik. Paradigma ini merupakan paradigma yang berkembang pada awal kelahiran ilmu administrasi Negara. Tokoh paradigma ini adalah antara lain pelopor berdirinya Ilmu Administrasi Negara Woodrow Wilson dengan karyanya "*The Study Of Administration*"(1887) serta F.W. Taylor dengan bukunya "*Principles of Scientific Management*".

Dalam bukunya "*The Study of Administration*", Wilson berpendapat bahwa problem utama yang dihadapi pemerintah eksekutif adalah rendahnya kapasitas administrasi, untuk mengembangkan birokrasi pemerintah yang efektif dan efisien, diperlukan pembaharuan administrasi. Ide-ide yang berkembang pada tahun 1900-an memperkuat paradigma dikotomi politik dan administrasi, seperti karya Frank Goodnow "*Politic and Administration*". Taylor adalah pakar manajemen ilmiah yang mengembangkan pendekatan baru dalam manajemen pabrik di sektor swasta. Metode ini menyebutkan ada cara terbaik untuk melaksanakan tugas tertentu. Manajemen ilmiah

dimaksudkan untuk meningkatkan output dengan menemukan metode produksi yang paling cepat, efisien dan paling tidak melelahkan.

Teori administrasi public klasik berkembang dimulai pada abad 19 dikenal dengan istilah **paradigma pertama** atau paradigma dikotomi politik administrasi dari tahun 1900-1926. Paradigma ini mempermasalahkan mengenai dimana seharusnya administrasi Negara itu berada, dengan tokohnya Frank J. Goodnow dan Lenand D. White yang mengatakan bahwa administrasi Negara seharusnya berpusat pada birokrasi pemerintahan. Namun, menimbulkan persoalan diantara kalangan akademisi dan praktisi mengenai dikotomi politik-administrasi. Dijelaskan bahwa administrasi Negara merupakan sub bidang ilmu politik.

Dalam administrasi model klasik, tugas kunci dari pemerintah adalah menyampaikan sejumlah pelayanan public seperti membangun dengan lebih baik, sekolah, rumah, saluran pembuangan serta menyediakan kesejahteraan yang dapat diserahkan kepada aparat pemerintah dan politik. Administrasi public menunjukkan dominasinya sebagai pemain utama, namun adanya sumber pembiayaan dari hasil pungutan pajak masyarakat menjadikan penyelenggaraan administrasi publik menjadi tidak efisien dan menjadi salah satu kritik teori klasik administrasi publik.

New Public Administration

Fase paradigma ketiga dikenal dengan teori-teori neoklasik dari administrasi Negara maka yang menarik adalah pandangan Herbert Simon (1947) diatas tentang Konsep Rasionalitas Murni dan Rasionalitas Terbatas pada proses pengambilan keputusan di dalam organisasi. Selain itu paradigam ketiga adalah penjelasan mengenai administrasi Negara sebagai ilmu politik yang berkembang pada tahun 1950-1970. Fase ini berusaha untuk menetapkan kembali hubungan konseptual antara administrasi Negara dengan ilmu politik. Tahun 1962 administrasi Negara bukan lagi dianggap

sebagai bagian dari ilmu politik. Menurut Keban, Yeremias T (2008) muncul paradigma baru yang tetap menganggap administrasi public sebagai ilmu politik dimana lokusnya adalah birokrasi pemerintahan. Pada akhirnya pada masa ini administrasi mengalami krisis identitas karena ilmu politik dianggap disiplin ilmu yang sangat dominan dalam administrasi public.

Pada tahun 1992, terjadi pergeseran paradigma yang dikenal dengan *post bureaucratic paradigm* yang dikemukakan oleh Barzely tahun 1992 dan oleh Arnajani tahun 1997, paradigma ini menekankan hasil yang berguna bagi masyarakat, kualitas dan nilai, produk dan keterikatam terhadap norma, mengutamakan misi, pelayanan dan hasil akhir, menekankan pemberian hasil bagi masyarakat, membangun akuntabilitas dan pemecahan masalah serta proses perbaikan yang berkesinambungan, memisahkan pelayanan dan control (Keban, Yerenias T,2005).

New Public Management

Adanya kritik mengenai teori-teori administrasi klasik dan neoklasik menyebabkan adanya pembaharuan dalam penyelenggaraan administrasi public sehingga menyebabkan adanya perubahan dalam penyelenggaraan administrasi public yang kemudian memunculkan konsep baru dikenal dengan *New Public Management*. Konsep ini pada awalnya ingin mengemukakan pandangan baru yang bisa mencerahkan konsep ilmu administrasi. Khusus konsep *New Public Management* biasanya diperlakukan untuk kegiatan bisnis dan sektor privat. Inti dari konsep ini adalah untuk mentransformasikan kinerja yang selama ini dipergunakan dalam sektor privat dan bisnis ke sektor public. Slogan terkenal yang digunakan adalah mengatur dan mengendalikan pemerintah tidak kauh bedanya mengatur dan mengendalikan bisnis. Lebih lanjut konsep ini meninjau kembali peran administrator public, peran dan sifat dari profesi administrasi (Thoba, Miftah, 2005).

Selain kritik terhadap teori klasik, munculnya *New Public Management* (NPM) juga dipicu dengan adanya krisis Negara kesejahteraan di New Zeland, Australia, Inggris, Amerika yang kemudian didukung adanya promosi dari IMF, Bank Dunia dan Serikat Persemakmuran dan kelompok konsultan manajemen. Di Negara-negara ini perkembangan yang terjadi dibidang ekonomi, sosial, politik dan lingkungan administrasi secara bersama mendorong terjadinya perubahan radikal dalam sistem manajemen dan administrasi public. Perubahan yang diinginkan adalah peningkatan cara pengelolaan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepadamasyarakat agar yang lebih efisien, efektif (Kurniawan, Teguh).

New Public Service

Setelah konsep dari Denhardt dan Denhardt mengenai *Old Public Administration* (Teori kalsik dan neoklasik) dan *New Public Management*, maka konsep yang ketiga adalah *New Public Service*(NPS).

Secara umum alur piker NPS menentang paradigma-paradigma sebelumnya (OPA dan NPM). Dasar teoritis paradigma NPS ini dikembangkan dari teori tentang demokrasi dengan lebih menghargai perbedaan, partisipasi dan hak asasi warga Negara. Dalam NPS konsep kepentingan public merupakan hasil dialog berbagai nilai yang ada ditengah masyarakat. Nilai-nilai seperti keadilan, transparasi dan akuntabilitas merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam pelayanan publik. Paradigma NPS berpandangan bahwa responsivitas (tanggungjawab) birokrasi lebih diarahkan kepada warga Negara bulan clients, konstutuen dan bukan pula pelanggan. Pemerintah dituntut untuk memandang masyarakat sebagai warga Negara yang membayar pajak.

Dalam suatu Negara yang menganut paham demokrasi, sebenarnya warga Negara tidak hanya dipandang sebagai customer yang perlu dilayani dengan standar tertentu saja, tetapi lebih dari itu, mereka adalah pemilik pemerintah yang memberikan pelayanan tersebut. Dalam pandangan *New Public Service*, administrator public wajib melibatkan masyarakat dalam pemerintahan dan tugas-tugas pelayanan umum lainnya. Tujuannya adalah untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik, sesuai dengan nilai-nilai dasar demokrasi serta mencegah potensi terjadinya korupsi birokrasi.

Menurut saya Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Desa Kawengen lebih masuk ke paradigma New Public Service karena birokrasinya lebih kepada warga Negara bukan client bukan juga pelanggan, dan kebanyakan dialog antar masyarakat dengan pemerintah buktinya dengan adanya Rumah Tidak Layak Huni ini termasuk lebih kebutuhan masyarakatnya juga agar masyarakat dapat memiliki rumah yang layak untuk mereka tinggali.

1.6.2 Kebijakan Publik

Kebijakan publik ialah satu dari beberapa macam program yang berisi sarana serta prasarana dibuat oleh suatu institusi maupun organisasi public yang membutuhkan penerapan serta tujuan ke khalayak ramai dengan mempertimbangkan beberapa macam hal penghambat pendukungnya. Arti kebijakan dapat dilihat dari berbagai pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli di bawah ini:

Menurut Laswell dan Kaplan (Nugroho, 2014:125), “ sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu nilai-nilai tertentu, dan praktek-praktek tertentu”. Keban (Tahir, 2014:20) mengemukakan bahwa kebijakan publik dapat dilihat dari konsep filosofis sebagai produk, sebagai proses, dan sebagai kerangka kerja. Sebagai konsep filosofis, kebijakan adalah seperangkat prinsip atau kondisi yang diinginkan untuk suatu produk, kebijakan dianggap sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi, dan sebagai proses, kebijakan dipandang

sebagai cara bagi organisasi untuk menemukan apa yang diharapkan. Akan dilakukan. Dan sebagai kerangka kerja, kebijakan adalah proses negosiasi dan negosiasi untuk mengembangkan isu dan praktik.

Sebagai salah satu disiplin ilmu, Administrasi Publik berperan dalam mengatur, membimbing dan mempercepat perubahan dalam masyarakat sesuai dengan harapan yang diinginkan. Dalam mewujudkan hal tersebut, Administrasi Publik menjalankan fungsinya sebagai pelaksana dan sekaligus mengarahkannya, agar seluruh kegiatannya termasuk yang dilaksanakan oleh masyarakat, terfokus pada tujuan utamanya berupa perubahan sosial yang diinginkan. Dalam rangka melaksanakan kegiatan yang mengubah nilai, pemerintah bertugas memelihara dan memperkuat kehidupan bersama. Di sisi lain, dalam penyelenggaraan pemerintahan, Good Governance dianggap sebagai acuan yang harus dibangun oleh birokrasi lembaga agar dapat menjalankan fungsi pemerintahan dengan baik.

“Strategi” diibaratkan dengan kata bahasa Inggris “strategy” yang diakui dari kata *strewdness* dan “excellence” (Suharto, 2006:7). Selain itu, pengertian kebijakan sendiri bagi pandangan Dye diperjelas bahwa :

“Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda”. (Nugroho,2012:119).

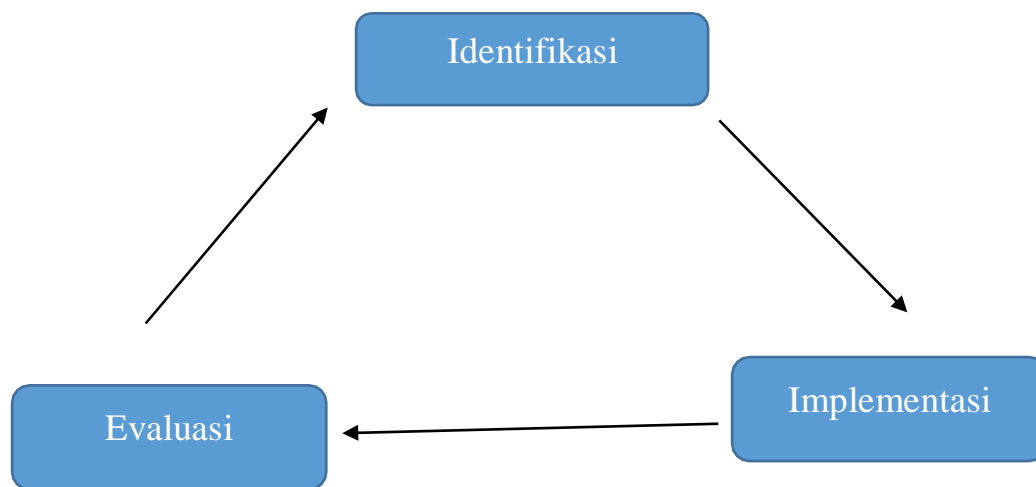
Sedangkan menurut Fredrich menjelaskan bahwa: “Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan(kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut dimaksudkan agar berguna

dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu”(Agustino,2008:7).

Sebelumnya dijelaskan oleh Fredrich, Anderson bahwa kebijakan publik dalam bukunya *Publik Policy Making*, antara lain :

Sedangkan menurut Suharto (2006: 78), ada beberapa tahapan dalam pengembangan kebijakan publik. Tahapan ini meliputi identifikasi, implementasi, dan evaluasi. Perumusan ini ditunjukkan pada gambar 2.1 berikut:

Gambar 2.1
Model Segitiga Tahapan Perumusan Kebijakan



(Sumber: Suharto,2006:78)

1. Tahapan Identifikasi

a. Identifikasi masalah dan kebutuhan

Tahapan yang pertama adalah perumusan kebijakan sosial merupakan mengumpulkan data mengenai permasalahan sosial yang dialami masyarakat serta beberapa macam kebutuhan penduduk yang tidak tersedia secara maksimal.

b. Analisis masalah sekaligus kebutuhan

Ialah memilah, mengolah, serta memilih data terhadap permasalahan serta kebutuhan masyarakat yang dianalisis serta dijadikan ke bentuk dokumen terorganisir.

- a. Informasi mengenai rancangan kegiatan
- b. Pemilihan model kebijakan
- c. Legitimasi public serta membangun dukungan

2. Tahap Implementasi

- a. Mengembangkan rencana kebijakan yang telah tersepakati serta dirumuskan kedalam bentuk strategi yang terkoordinasi ke bentuk usulan program seperti pilihan tindakan serta pedoman untuk implementasi peraturan.

b. Perancangan dan Implementasi Program

Mengimplementasikan kebijakan ke bentuk macam-macam usulan proyek ataupun program sosial untuk dilaksanakan atau diterapkan pada tujuan program merupakan kegiatan utama pada tahap ini.

3. Tahap Evaluasi

a. Evaluasi sekaligus Tahap Lanjutan

Evaluasi dilakukan mengenai suatu buah tahap sekaligus menghasilkan implementasi kebijakan. Evaluasi terhadap proses kebijakan berfokus terhadap fase pembuatan kebijakan, paling penting integrase antar tahapan, dan sejauh mana layanan serta program sosial mengikuti garis kebijakan yan sudah ditentukan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dilaksanakannya tiga tahap perumusan kedalam

kebijakan public. Yang pertama, kenali isu-isu yang ada secara lokal atau yang dirasakan oleh daerah setempat dan bedakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang miskin di daerah setempat. Kedua, tahap eksekusi dilakukan untuk menaklukkan isu-isu yang sedang terjadi. ketiga, persyaratan penilaian untuk mengukur sejauh mana pendekatan telah dilaksanakan ke area local.

1.6.2.1 Makna Kebijakan Publik

Definisi Dye tentang politik menyatakan bahwa, seperti dikutip Anggara dalam bukunya Analisis Kebijakan Publik (2014:35), "*Public Policy is whatever the government choose to do or not to do*" (kebijakan publik adalah apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu).

Pengertian di atas dapat disimpulkan ketika pemerintah memutuskan agar merencanakan yang baik. Alhasil ketertiban dan kesusilaan masyarakat merupakan tindakan pemerintah, sehingga memiliki tujuan. Ketika pemerintah memutuskan untuk tidak melakukan apa pun, itu juga termasuk kebijakan publik sebab bertujuan.

Peneliti juga memberikan definisi politik, menurut Avidin, yang dikutip oleh Angala pada bukunya Analisis Kebijakan Publik(2014: 37), menyatakan: Kebijakan Publik tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Kebijakan dibuat dan ditentukan untuk masalah yang Anda hadapi, atau berdasarkan kepentingan individu, kelompok, atau pemerintah itu sendiri.

1.6.2.2 Tujuan Kebijakan Publik

Strategi public ialah pilihan dari Penguasa Negara yang mengharapkan untuk mengarahkan kehidupan normal. Alasan untuk strategi publik itu sendiri dapat dikenali dalam hal aset atau (harta) khususnya antara pengaturan terbuka yang berarti mengedarkan aset negara dan mereka

yang tujuannya adalah untuk mempertahankan aset negara. Jadi, pemahaman pertama adalah *distributive versus absorptif*. Pemilihan kedua dari tujuan kebijakan adalah *regulative versus deregulatif*. Pendekatan administratif bersifat mengarahkan dan membatasi, seperti strategi perpajakan, pengaturan perolehan tenaga kerja dan produk, pendekatan kebebasan dasar, pendekatan jaminan modern, dan sebagainya. Dinamisasi versus stabilisasi merupakan pemilihan yang ketiga kali. Kebijakan dinamisasi diketahui sebagai kebijakan yang nantinya akan menggerakkan sumber daya nasional untuk dapat dicapai melalui kemajuan tertentu yang dikehendaki. Misalnya, kebijakan desentralisasi, kebijakan zona *industry eksklusif*, dan lain-lain. Pemilihan terakhir merupakan suatu kebijakan sebab ia diperkuat Negara versus melalui negara pasar. Kebijakan yang memperkuat Negara merupakan kebijakan-kebijakan yang nantinya akan menjadi pendorong lebih besarnya peran public atau mekanisme.

1.6.2.3 Proses Kebijakan Publik

Suatu proses pembuatan kebijakan berlangsung sebagai suatu siklus kebijakan, mulai saat penetapan agenda dengan identifikasi atau definisi isu-isu publik hingga proses semacam evaluasi atau evaluasi kebijakan. Berikut ini adalah gambaran proses pengembangan kebijakan publik yang dijelaskan oleh Ayuningtyas (2014:30).

- Rancangan Agenda

Dalam menanggapi masalah publik, birokrasi pemerintah dapat bergerak serta dapat terlibat melalui proses pengembangan proses formulasi serta cara implementasi kebijakan, termasuk keterlibatan dalam mengatasi masalah yang muncul selama proses pembuatan kebijakan.

- **Formulasi Kebijakan**

Proses formulasi kebijakan biasanya melibatkan fase-fase seperti mendefinisikan proses pengembangan kebijakan, menjelaskan masalah, dan menetapkan tujuan dan sasaran.

- **Menerima Kebijakan**

Tahap selanjutnya setelah pengembangan kebijakan merupakan adopsi kebijakan. Ini adalah proses secara formal mengadopsi ataupun mengadpsi solusi suatu kebijakan alternatif yang diidentifikasi sebagai produk peraturan ataupun kebijakan, lalu kemudian diimplementasikan .

1.6.3 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah langkah penting dalam proses kebijakan publik. Anda harus menerapkan kebijakan atau program untuk mencapai efek serta proses akhir yang dinantikan. Implementasi kebijakan secara mendalam dianggap sebagai alat administratif di mana aktor, organisasi, proses, metode, dan sumber daya diorganisir bersama untuk mengimplementasikan kebijakan untuk mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan. Van Meter dan Van Horn (2005:102) dari Budi Winarno mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai berikut: “Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi public yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

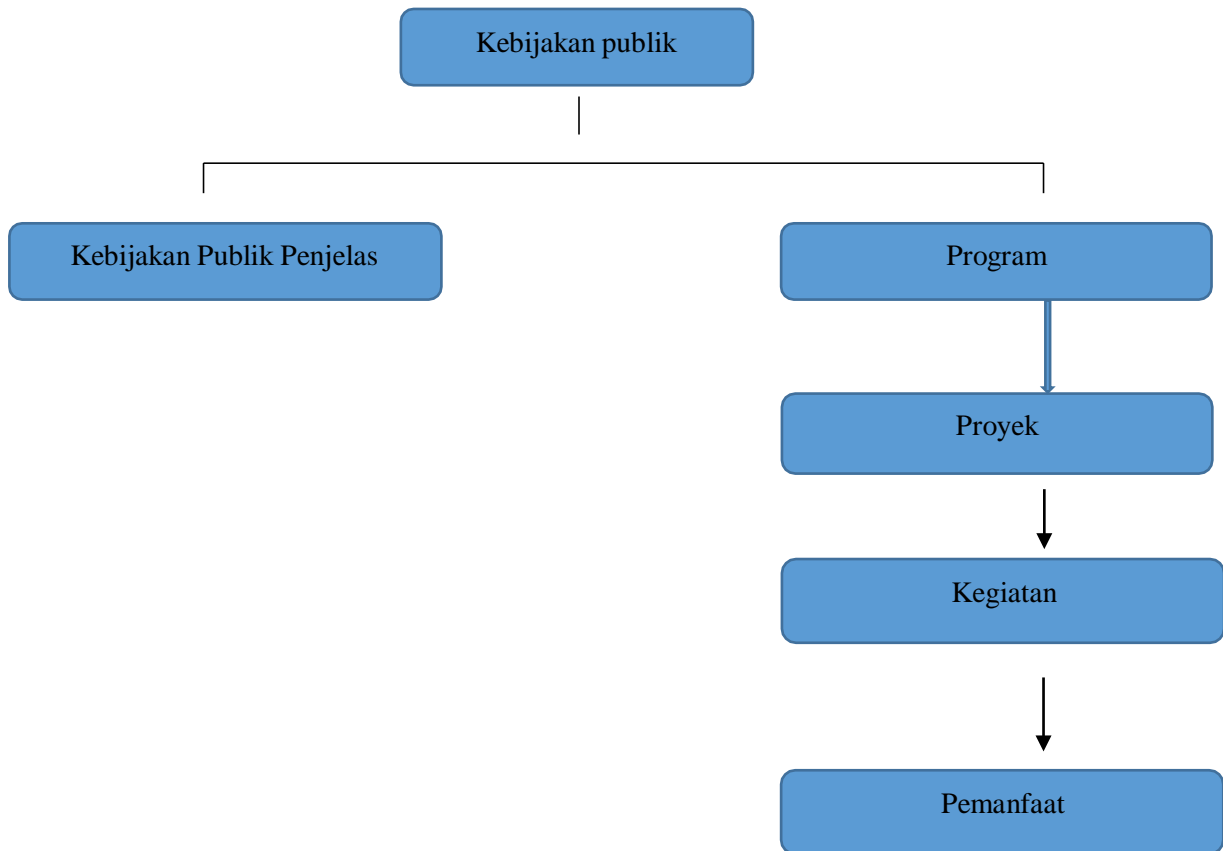
Implementasi Kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan. artinya implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan dimana tujuan

serta dampak kebijakan dapat dihasilkan. Pentingnya implementasi kebijakan ditegaskan oleh pendapat Udoji dalam Agustino (2006:154) bahwa : *"The execution of policies is as important if not more important than policy making. Policy will remain drams or blue print jackets unless they are implemented"*.

Bagi Mulyadi (2015:46), "implementasi suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau transformasi yang bersifat multiorganisasi, dimana perubahan yang diterapkan melalui strategi implementasi kebijakan ini mengaitkan berbagai lapisan masyarakat". Sedangkan bagi Nugroho (2012:675) Pada prinsipnya, implementasi suatu kebijakan harus menjadi cara bagi suatu kebijakan untuk mencapai tujuan. Untuk melakukan strategi terbuka, ada dua opsi langkah. Dengan kata lain, ini dilakukan secara langsung sebagai program atau dieksekusi secara langsung melalui rincian strategi yang diperoleh dari strategi publik. Secara garis besar dapat diilustrasikan seperti dibawah ini:

Gambar 2.3
Seukensi Implementasi Kebijakan

(Sumber: Nugroho, 2012:675)



Proses implementasi kebijakan di atas dijelaskan bahwasanya kebijakan publik dioperasikan melalui sebuah bentuk kegiatan yang terancang. Selanjutnya, program ini dikurangi menjadi proyek pada saat kegiatan itu diungkapkan (Nugroho, 2012: 680). Kegiatan menangani penggunaan program, yang memiliki keuntungan. Pada akhirnya, kegiatan dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Konsep implementasi kebijakan pada hakikatnya adalah bentuk sebuah proses yang diambil oleh pemerintah agar tujuan yang diterapkan pada hasil kebijakan. Kegiatan ini awalnya dari pemerintah dan kelompok swasta dikarenakan mampu akan mencapai suatu hasil yang ditetapkan bersama. Tak perlu dikatakan, kebijakan itu tidak konsisten dengan masyarakat.

Keberhasilan kebijakan tersebut dapat dilihat atau diukur dari proses serta mencapai pada hasil akhir (yaitu, apakah tujuan dicapai (Agustino, 2008: 139) Agustino's Grindle (2008: 139) seperti:

“ keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan apa yang telah ditentukan, yaitu melihat pada action program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai”.

Apabila kebijakan tersebut tidak benar atau saja masalahnya tak bisa dikurangi, kebijakan tersebut kemungkinan gagal bahkan jika kebijakan tersebut diterapkan dengan sangat sempurna. Bagi Parson (2008: 487) Sabatier, ada kondisi sebab cukup harus mempunyai keefektifan untuk implementasi, antara lain:

1. Konsistensi serta suatu tujuan yang jelas sehingga dapat menjadi sumber daya serta kriteria evaluasi hukum.
2. Menjamin bahwa itu mencakup teori kasual yang sesuai dan teori yang masuk akal mengenai sebuah proses mengubah kebijakan.
3. Suatu struktur implementasi mengkonfigurasi melalui proses hukum dikonfigurasi digunakan saat mendukung orang yang menerapkan kebijakan dalam grup yang tunduk pada kebijakan.
4. Pelaksana ahli dan eksekutif yang berjanji untuk menggunakan kebijakan agar tercapainya suatu kebijakan.
5. Patronasi dari undang -undang serta otoritas dan organisasi laba eksekutif.
6. Perubahan melalui kondisi sosial dan ekonomi yang tak terlihat lemahnya kelompok sekaligus penguasa, ataupun teori kasual di bawah kebijakan yang tidak diganggu.

Inti implementasi pada dasarnya kebijakan yang ditentukan kepada pihak yang memiliki wewenang sehingga serangkaian kegiatan tersebut direncanakan yang dieksekusi oleh agen pelaksana dapat mencapai penetapan tujuan. Faktanya, implementasi suatu kebijakan jarang jarang dibebankan dalam inventaris berbagai kepentingan, tetapi berfokus pada masalah yang kompleks (Agustino, 2008: 138).

Melalui beberapa definisi diatas diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkutkan 3 macam, antara lain :

1. Terdapat sebuah sasaran kebijakan ataupun tujuan
2. Keberadaan kegiatan serta kegiatan untuk mencapai tujuan
3. Terdapat hasil kegiatan.

Karena implementasi suatu kebijakan adalah suatu kegiatan atau kegiatan, dimungkinkan untuk menyimpulkan bahwa hasilnya akan diperoleh dengan tujuan yang diinginkan serta tujuan sebab kebijakan tersebut.

1.6.3.1 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Horn and Meter, yang dikutip oleh Anggara pada bukunya Analisis Kebijakan Publik (2014: 232) , pemahaman tentang suatu implementasi kebijakan tersebut merupakan: Keputusan kebijakan. Implementasi ini adalah tindakan pemerintah yang diambil agar tercapainya tujuan pada penetapan keputusan sebelumnya. Partai pemerintah yang menciptakan kebijakan perlu dipertimbangkan sebelumnya apakah kebijakan mendapatkan sebuah efek yang tidak baik. Implementasi ini dikaitkan sebab proses politik administratif dikarenakan tujuan mempertahankan tujuan ini.

Dalam metode ini, untuk mengimplementasikan kebijakan pemerintah dengan benar, peneliti berikutnya membentuk ikatan antara kebijakan dan hasil sesuai dengan analisis kebijakan publik Anggara Book (2014: 263). Kirimkan variable, mengikuti:

- 1) Tujuan kebijakan serta tindakan dasar.
- 2) Suatu sumber kebijakan.
- 3) Komunikasi antara organisasi serta proses giat implementasi.
- 4) Personalitas badan implementasi.
- 5) Tendensi terhadap implementasi.
- 6) Ekonomi, politik serta kondisi sosial.

1.6.3.2 Model Pendekatan Implementasi Kebijakan

Untuk mengimplementasikan implementasi kebijakan publik, Anda memerlukan model implementasi dengan menggunakan sebab memeriksa rentang implementasi. Terdapat macam – macam model yang berkembang akibat pengaruh oleh sekelompok ahli.

1. Model Mazmanian dan Sabatier

Model Mazmanian dan Sabatier merupakan sebuah model baru dikompilasi berdasarkan sebuah tahap implementasi kebijakan. Model implementasi tersebut disediakan dikatakan sebagai bingkai untuk analisis implementasi kebijakan. Kedua ahli kebijakan tersebut berpendapat bahwasanya terdapat sebuah peran penting dalam menerapkan kebijakan publik adalah kemampuan untuk mengidentifikasi variabel dengan mempengaruhi tujuan absah dalam seluruh proses implementasi (Agustino, 2008: 145.)

Terdapat tahap implementasi kebijakan, ada tiga kemungkinan variabel independen yang dapat mempengaruhi, yaitu, untuk membuat masalah terkontrol lebih mudah atau tidak mudah.

Untuk indikator variabel sederhana atau tidak mudah, masalah kebijakan adalah sebagai berikut.

1. Keragaman kesulitan teknis dalam pergerakan kelompok sasaran.
2. Rasio kelompok target dibandingkan dengan populasi.
3. Kisaran perubahan dalam gerakan yang diinginkan.

Di sisi lain, dalam variabel kemampuan kebijakan, indikator dapat disebutkan sebagai berikut.

1. Jelasnya sebuah konsistensi tujuan
2. Penggunaan teori kasual yang memadai
3. Pesanan untuk distribusi sumber pendanaan
4. Integrasi Lembaga Implementasi dan Hirarki Menengah
5. Aturan Penentuan dari Lembaga Implementasi
6. Perekrutan Staf Implementasi
7. Akses resmi di luar partai.

Selanjutnya, variabel luar dari kebijakan indikator adalah sebagai berikut.

1. Ekonomi sosial dan kondisi teknis
2. Proses dukungan public
3. Informasi dan sumber sikap yang diperoleh melalui grup
4. Dukungan yang didapat melalui staff tertinggi
5. Kemampuan kepemimpinan serta komitmen yang nantinya akan dilakukan staff tertinggi.

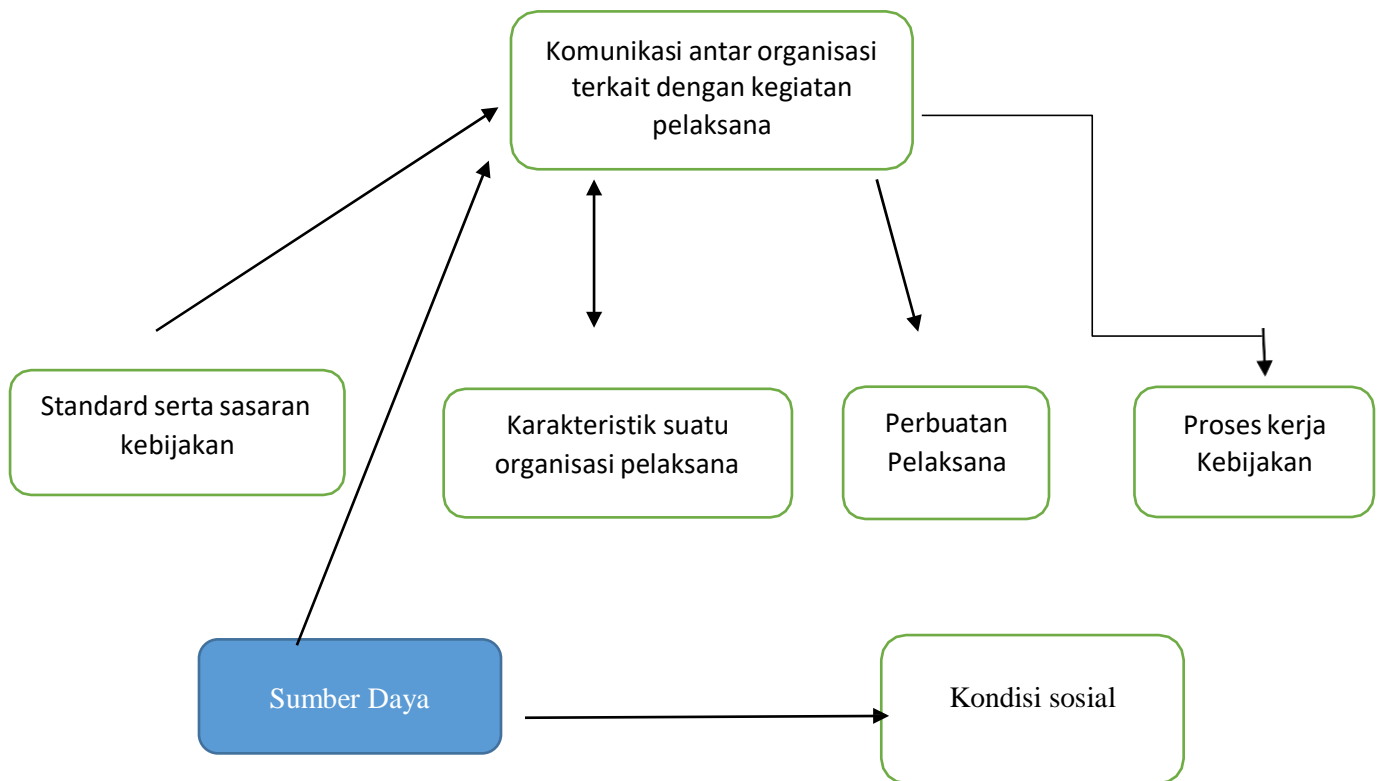
2. Model Donald Van Meter dan Carl Van Horn

Model tersebut adalah model implementasi yang paling tradisional. Penggunaan model yang diformulasikan oleh tanduk dikatakan sebagai model implementasi kebijakan. Ini berarti bahwa dalam proses implementasi, abstrak atau proses suatu kinerja implementasi kebijakan yang ada dilakukan dengan sengaja, dengan berbagai variable kinerja pada implementasi kebijakan yang tinggi dilakukan.

Model tersebut mengasumsikan bahwasanya implementasi kebijakan saat itu dengan perlahan dieksekusi melalui kinerja kebijakan publik, implementasi, dan kebijakan publik. Dinyatakan bahwasanya rute yang terhubung dengan bijaksana dan pekerjaan terpisah dikarenakan banyaknya variabel timbal balik (Ali, Alam, 2012: 110). Inilah beberapa variabel input untuk memengaruhi kebijakan public antara lain:

1. Ukuran dan tujuan variabel
2. Sumber daya
3. Aktivitas implementasi
4. Agen implementasi atau karakteristik pelaksana
5. Suatu limitasi ekonomi, sosial serta politik
6. Pelaksana atau eksekutor yang cenderung monoton

Gambar 2.4
Model Implementasi Meter dan Horn

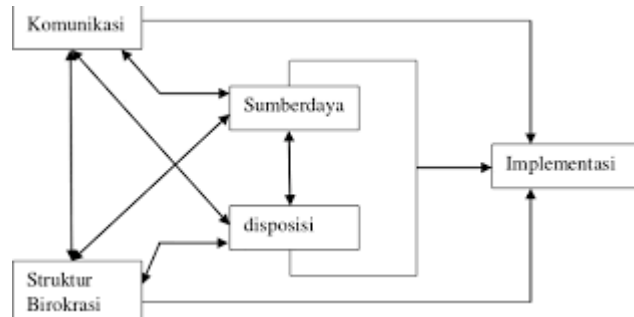


Sumber : Van Metter & Van Horn (Agustino,2016)

Beberapa model implementasi berkembang melalui pemikiran Edward III disebut Winarno (2007: 144) Langsung dan Implementasi, dan terdapat 4 variabel yang nantinya akan menentukan kesuksesan implementasi, antara lain:

- a. Komunikasi.
- b. Sumberdaya.
- c. Pengaturan.
- d. Struktur birokrasi.

Gambar 2.5
Model direct and indirect of implementation



(sumber: Winarno, 2007:144)

Proses tersebut digambarkan sebagai abstraksi bahkan kinerja kebijakan pada hakikatnya diimplementasikan supaya mencapai proses kerja kebijakan publik yang memuaskan dalam hubungan antara berbagai variabel. Model tersebut mengimplementasikan sumber daya politik yang tersedia, komunikasi, serta implementasi kebijakan dengan menggunakan garis lurus dari implementasi kebijakan. Melalui model implementasi tersebut, terdapat empat masalah utama sebab perlu memperhitungkan komunikasi, sumber daya, posisi, dan birokrat sehingga implementasi kebijakan diterapkan secara efektif.

Komunikasi terkait kebijakan disampaikan terhadap organisasi maupun pada umumnya, serta sikap para pemangku kepentingan. Sumber daya dukungan, terutama sumber daya ketersediaan SDA. Hal terkait dengan pelaksanaan implementasi kebijakan publik agar terlaksana kebijakan itu secara memuaskan.

Pembuangan terkait dengan kemungkinan penggunaan pelaksana untuk inasikebijakan publik. Sumber itu sendiri tidak cukup tanpa kemungkinan dan komitmen untuk

mengimplementasikan kebijakan tersebut. Di sisi lain, struktur birokrat terkait dengan adanya kesesuaian birokrat, penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah untuk menghindari fragmentasi birokrasi karena proses implementasi tidak efektif dikarenakan struktur ini (Nugroho, 2012: 693).

4. Model Merille S. Grindle

Model implementasi lain adalah model grindle. Model tersebut dijelaskan bahwa sebuah implementasi kebijakan yang telah dipilih oleh konten kebijakan serta implementasi status. Gagasan dasarnya ialah kebijakan tersebut diterapkan setelah kebijakan diubah.

Keberhasilan ini ditentukan oleh tingkat implementasi kebijakan. Isi dari kebijakan adalah sebagai berikut:

- a. Keuntungan yang diisi oleh kebijakan
- b. Beberapa manfaat yang akan dihasilkan
- c. Perubahan yang diinginkan
- d. Posisi pembuat kebijakan
- e. (siapa) pelaksana program
- f. Sumber daya yang dikerahkan

Di sisi lain, konteks implementasi adalah sebagai berikut.

- a. Kekuasaan, kepentingan serta strategi aktor yang terkait.
- b. Karakteristik lembaga serta otoritas.
- c. Kepatuhan dan tanggapan.

5. Model Hogwood dan Gunn

Model yang dikembangkan oleh Hogwood dan Gunn (Ali, Alam, 2012: 109) menjelaskan

bahwa kondisi berikut ini sepenuhnya diperlukan saat menerapkan kebijakan negara.

Adapun beberapa syaratnya:

- a. Mereka yang menyebabkan obstruksi/kecacatan serius
- b. Waktu dan sumber yang tepat untuk pelaksana program
- c. Kombinasi sumber yang diperlukan sepenuhnya tersedia
- d. Kebijaksanaan yang nantinya akan diimplementasikan yang didasarkan pada sebuah hubungan kualitas yang andal
- e. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
- f. Hubungan saling ketergantungan harus kecil

Dalam implementasi kebijakan publik, ada beberapa model yang perlu digunakan untuk menjadi pedoman atau pedoman sehingga implementasi kebijakan tidak menyimpang dari yang diformulasikan sebelumnya. Model implementasi kebijakan berada dalam kisaran menganalisis proses implementasi kebijakan sebagai alat yang menjelaskan situasi dan kondisi yang terjadi setelah ketentuan kebijakan, dan dapat menjelaskan tindakan yang terjadi. Oleh karena itu, penggunaan model implementasi kebijakan sangat diperlukan untuk melakukan penelitian tentang implementasi kebijakan. Menurut para ahli yang sering diterapkan, ada beberapa model dalam implementasi kebijakan.

Secara umum, model -model ini menjelaskan faktor -faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan untuk pencapaian kebijakan. "*Implementation as a Political and Administrative Process*". Menurut proposal Grindle untuk menerapkan kebijakan publik, keberhasilan kebijakan publik adalah proses pencapaian hasil akhir (hasil), yaitu, saya tidak ingin mencapai tujuan saya. Pengukuran keberhasilan dapat dilihat dari 2 macam.

Prosesnya Kebijakan, apakah pelaksanaan kebijakan telah sesuai dengan yang

ditentukan dengan merujuk pada aksi kebijakannya. Pencapaian tujuan kebijakan impact atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok, tingkat perubahan yang terjadi dan juga penerimaan kelompok sasaran. Selain itu, keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik juga sangat ditentukan oleh tingkat keterlaksanaan kebijakan yang terdiri atas isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*) Isi kebijakan meliputi:

- a) *Interest Affected*, yaitu kepentingan yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan.
 - b) *ype of Benefits*, yaitu jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan.
 - c) *Extend of Change Envision*, yaitu seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi sehingga harus mempunyai skala yang jelas.
 - d) *Site of Decission Making*, yaitu, letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.
 - e) Program Implementer, yaitu implementasi kebijakan atau program yang harus didukung oleh adanya pelaksana yang berkompeten.
 - f) *Resources Committed*, yaitu, sumber daya yang harus mendukung agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik.
1. Isi implementasi yaitu meliputi:
- a) *Power, Interest and Strategy of Actor Involved*, yaitu kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat.
 - b) *Institutionan regime characteristic*, yaitu, karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa sebagai lingkungan di mana implementasi kebijakan dijalankan

2. *Compliance and Responsiveness*, dengan kata lain, ketika menanggapi implementasi kebijakan yang dieksekusi, apa tingkat kepatuhan dan respons dari implementasi.

1.6.3.3 Proses Implementasi Kebijakan

Implementasi mengacu tentang tindakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan. Tindakan ini mengubah keputusan ini menjadi pola operasi dan mencoba mencapai perubahan besar atau kecil seperti yang ditentukan sebelumnya.

Implementasi ini pada dasarnya adalah Scarcaya yang memahami apa yang terjadi setelah program menerapkan proses kebijakan. Ini terkait dengan agensi yang bertanggung jawab atas penerapan kebijakan, tetapi juga jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial. Pada tingkat praktis, implementasi kebijakan adalah proses yang mengimplementasikan keputusan dasar.

Proses ini adalah tahap ratifikasi antara undang -undang dan peraturan, perintah untuk keputusan dengan melaksanakan lembaga, ketersediaan kelompok sasaran yang melaksanakan keputusan, dampak sebenarnya dari keputusan yang diinginkan, dan peraturan yang diharapkan.

1.6.4 Definisi Rumah

Rumah merupakan suatu tempat tinggal yang mampu sebagai tempat tinggal/penginapan dan sarana untuk membina sebuah keluarga . Rumah tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan tempat tinggal, tetapi lebih dari itu rumah juga merupakan tempat tinggal manusia dalam melakukan tuntutan hidup bagi masyarakat (Trikomara, Sebayang, Putri, 2007:2). Penataan penginapan yang baik akan benar-benar ingin bekerja pada kepuasan pribadi penghuninya. Sebagai salah satu kebutuhan mendasar selain pakaian, makanan, pelatihan dan kesejahteraan, rumah memiliki arti penting. Rumah pada dasarnya dipandang memiliki pilihan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang nantinya akan menjadi tempat aman dari intensitas dan hujan serta tempat yang

aman dari berbagai bahaya alam. Seringkali rumah hanya dipandang sebagai bangunan yang sebenarnya, sehingga penataan penginapan hanya untuk mencapai fokus jumlah tanpa memperhatikan kualitas dan sifat dari penginapan (Nurasrizal, 2010:29).

Adapun definisi rumah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman adalah sebagai berikut:

1. Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, pelaksanaan kawasan permukiman, pemeliharaan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
2. Perumahan adalah pertemuan rumah sebagai tempat tinggal di daerah perkotaan dan pedesaan, dan dilengkapi dengan infrastruktur, fasilitas, dan bisnis kepentingan publik sebagai akibat dari upaya untuk memenuhi rumah penduduk.
3. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di kawasan baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan, yang fungsinya sebagai lingkungan tempat tinggal dan tempat kegiatan yang mendukung kehidupan dan penghidupan.
4. Lingkungan perumahan adalah bagian dari area rekonsiliasi yang terdiri dari banyak unit permukiman
5. Permukiman adalah sebagai bagian lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan.
6. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi.

7. Rumah merupakan Bangunan yang berfungsi sebagai rumah yang layak huni, fasilitas pengembangan keluarga, refleksi martabat dan martabat, dan aset pemilik

Sebagai bangunan di sebuah ruangan di sebuah ruangan yang dikelilingi oleh dinding dan atap. Rumah itu memiliki pintu masuk pintu dengan jendela tambahan. Lantai pertama biasanya bentuk tanah, ubin, keramik, bub, atau bahan lainnya. Rumah gaya modern biasanya memiliki elemen - elemen ini. Kamar rumah biasanya dibagi menjadi beberapa kamar yang fungsional, seperti kamar tidur, kamar mandi, toilet, ruang makan, dapur, rumah keluarga, ruang tamu, garasi, teras, dan pekarangan.

Dalam kehidupan sehari -hari, orang biasanya bekerja di luar rumah, pergi ke sekolah, dan melakukan kegiatan lain. Kegiatan yang sering dilakukan di rumah sedang beristirahat dan tidur. Sisa rumah berfungsi sebagai tempat untuk bergerak di antara di dalam dan di luar taman. Selain itu, ada tempat -tempat di mana Anda dapat menikmati kehidupan yang nyaman, tempat istirahat, pertemuan keluarga Anda, tingkat sosial masyarakat, dan menikmati lingkungan yang sehat.

Setiap orang harus menempati rumah yang layak sehingga pusat pelatihan keluarga keluarga dapat dicapai. Rumah yang layak dapat menjaga kegiatan kehidupan sehari -hari secara normal. Pandangan komunitas tentang rumah -rumah yang mudah -untuk -untuk berbeda. Referensi rujukan tempat tinggal biasanya ditentukan berdasarkan tingkat kemampuan dan tingkat kebutuhan.

1.6 Operasional Konsep

Keberhasilan implementasi program dapat dilihat dari kesesuaian antara pelaksanaan dengan pedoman pelaksanaan yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Semarang Nomor 41 Tahun 2016 dan kesesuaian antara tujuan dan sasaran program. Dari hasil penjelasan di atas, Anda dapat

mengatakan bahwa implementasi program pada dasarnya dinyatakan.

Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Desa Kawengen sudah dapat berjalan dengan baik, Namun, dalam implementasi, tidak dapat dipisahkan dari kecacatan dalam proses penerapan program rehabilitasi sosial rumah yang tidak dapat tinggal di Desa Kawengen. Tujuan dari program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Desa Kawengen yakni:

- a. Meningkatkan tingkat hidup di masyarakat agar lebih baik
- b. Memberikan tempat tinggal yang layak
- c. Memberikan hidup yang layak dan bersih dan sehat.

Sumber daya manusia dan sumber daya finansial Ini adalah faktor penghambatan dalam implementasi program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Desa Kawengen tenaga kerja bersifat gotong royong. Padahal untuk mencari tenaga gotong royong susah, sehingga dana yang diberikan sebagian digunakan untuk upah tenaga kerja. Hal semacam ini mengakibatkan penggunaan dana kurang sesuai.

Pelaksanaan pemugaran sosial rumah-rumah kumuh di Desa Kawengen selama ini telah berjalan dengan baik sebab perlakuan di sebagian besar Desa Kawengen telah berhasil dilakukan dalam hal perbaikan beberapa bagian rumah seperti atap, lantai, dinding, dan WC. yang pada awalnya kurang layak untuk tempat tinggal, namun masih ada beberapa rumah. yang eksekusinya hanya berlaku dalam hal memperbaiki satu bagian karena itu memusatkan perhatian pada satu bagian yang rusak sehingga bagian yang berbeda belum diselesaikan.

Fenomena akan diteliti untuk penelitian ini memfokuskan saat proses implementasi mengenai program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Desa Kawengen dengan mengacu 4 variabel yang dikemukakan oleh Edwards III, yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur

Birokrasi.

1. Komunikasi, program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Desa Kawengen dapat dibilang efektif apabila Pemerintah Kabupaten Semarang telah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Proses implementasi program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Desa Kawengen akan dapat dijalankan dengan baik apabila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus dikomunikasikan kepada instansi yang terkait. Selain itu, komunikasi yang disampaikan keada instansi harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi diperlukan agar implementor semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan kepada masyarakat, dalam hal ini guna menyukseskan proses implementasi program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Desa Kawengen.
2. Sumber Daya, terdapat beberapa indikator yang perlu diperhatikan dalam proses implementasi program reabilitas sosial rumah tidak layak huni di Desa Kawengen. (i) staf, beberapa kegagalan implementasi salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi, memadahi, ataupun tidak berkompeten terhadap bidangnya. Penambahan jumlah staf yang diperlukan guna menjalankan program implementasi rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Desa Kawengen tidak hanya mencakup tentang penambahan jumlah, namun diperlukan pula kecukupan staf yang berkapabilitas dan berkompeten dalam mengimplementasikan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Desa Kawengen. (ii) informasi, Pemerintah Kabupaten Semarang harus mengetahui apa yang menjadi fokus dari adanya rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Desa Kawengen dan Pemerintah Kabupaten Semarang harus memberikan kesempatan kepada instansi lain, masyarakat, dan swasta untuk terlibat dalam

program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di desa Kawengen . (iii) wewenang, efektifitas kewenangan implementasi program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Desa Kawengen diperlukan dalam pelaksanaan implementasi program tersebut, tetapi pada sisi lain efektifitas akan menjadi salah satu faktor penghambat manakala wewenang yang dimiliki oleh implementor disalah gunakan demi kepentingan sendiri atau demi kepentingan kelompoknya. (iv) fasilitas, fasilitas fisik merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Desa Kawengen. Pemerintah Kabupaten Semarang mungkin memiliki staf yang mencukupi dan mengerti apa yang harus dilakukan. Tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) implementasi program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di desa Kawengen tidak akan berhasil.

3. Disposisi, jika implementasi program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni(RS-RTLH) di Desa Kawengen ingin berjalan efektif maka implementor program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Desa Kawengen tidak hanya harus memiliki kemampuan tidak hanya untuk mengetahui apa yang harus dilakukan, tetapi juga untuk melakukannya sehingga tidak benar -benar terjadi.
4. Struktur Birokrasi, meskipun sumber daya untuk melakukan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Desa Kawengen tersedia, implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dan memiliki keinginan untuk melaksanakan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Desa Kawengen, kemungkinan program ini tidak dapat dilakukan karena struktur birokrasi memiliki titik lemah. Program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Desa Kawengen yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama dari berbagai pihak, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada program tersebut maka hal ini dapat menyebabkan

sumber daya tidak efektif dan tidak memotivasi mereka untuk termotivasi sehingga menghambat jalannya proses program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Desa Kawengen. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah program harus dapat mendukung program yang telah diputuskan dengan melakukan koordinasi kepada instansi terkait dengan baik.

1.7 Argumen Penelitian

Argumen penelitian terdapat dua bentuk yakni Deduksi dan Induksi, dua argument yang sangat penting dalam penelitian. Ini terkait dengan hasil penelitian yang harus dijelaskan dalam diskusi yang dapat diterima. Keduanya dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Deduksi

Deduksi adalah proses yang diakhiri sebagai hasil dari alasan proposal berdasarkan hasil analisis data. Proses kesimpulan pengurangan didasarkan pada alasan yang benar dan sah. Proses dan metode menyimpulkan dengan menguji hipotesis deduksi berdasarkan alasan yang sah disebut hukum duktif, dan penelitian ini disebut studi doactive. Melakukan proses seperti duktif selalu digunakan dalam penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif.

b. Induksi

Induksi ini didefinisikan sebagai proses untuk menyimpulkan berdasarkan satu atau dua fakta atau bukti. Pendekatan bimbingan sangat berbeda dari pengurangan. Tidak ada hubungan yang kuat antara alasan dan kesimpulannya. Proses pembentukan hipotesis dan kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan terlebih dahulu dan data yang dikumpulkan disebut proses penginduksi, metode ini disebut metode penginduksi, dan penelitian ini disebut penelitian yang diinduksi.

Pada program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RS-RTLH) di Desa Kawengen peneliti menggunakan bentuk induksi. Hasil program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RS-RTLH) di Desa Kawengen sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik. Berdasarkan data ini kita dapat menarik kesimpulan sementara (hipotesis) bahwa masalahnya kurang meratanya program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RS-RTLH) di Desa Kawengen. Tapi kita dapat membuat kesimpulan lainnya, seperti :

- Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Desa Kawengen cuma memperbaiki hanya satu komponen.
- Kurangnya dana pada program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RS-RTLH) di Desa Kawengen.

1.8 Metode Penelitian

1.9.1 Desain Penelitian

Penelitian tersebut dilakukan guna meneliti deskriptif kualitatif. Artinya, sebuah studi yang mencoba mengekspresikan masalah dan peristiwa hanya untuk mengekspresikan fakta yang ada di lapangan. Hasil penelitian ditekankan kepada gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang sedang diteliti (Hadar Nawawi, 2003:31).

Penelitian Kualitatif adalah tradisi khusus ilmu sosial, pada dasarnya tergantung pada pengamatan manusia di wilayah Anda, dan terkait dengan orang-orang pada bahasannya dan peristilihannya. (Lexy Meolong, 2001)

Metode Kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk memeriksa kondisi objek alami. Dimana peneliti sebagai cara yang penting, para peneliti dilakukan dalam kombinasi metode pengumpulan data, dan lebih banyak penekanan pada menginduksi analisis data dan hasil

penelitian kualitatif serta lebih menekankan kepada makna suatu permasalahan dibanding generalisasi.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian menetapkan lokasi atau area dimana penelitian ini nantinya dilaksanakan. Fokus dari penelitian ini adalah **Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Desa Kawengen**, sehingga lokus atau tempat yang diambil adalah berdasarkan fokus penelitian di atas yakni di Desa Kawengen .

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek Penelitian adalah individu atau kelompok yang diharapkan oleh para peneliti agar bisa mengetahui tentang sesuatu yang sangat berkaitan dengan fenomena atau studi kasus yang sedang diteliti. Atau dengan kata lain dapat disebut sebagai informan.

Informan adalah individu atau kelompok yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang penelitian kualitatif ini sehingga informan tersebut bisa memberikan informasi mengenai situasi serta kondisi terhadap penelitian yang sedang penulis teliti.

Dalam penelitian ini dibutuhkan beberapa narasumber atau informan. Dalam melakukan penelitian, penyedia informasi yang baik adalah penyedia informasi yang andal, memiliki tampilan maupun wawasan luas terhadap program, atau terlibat secara langsung dengan implementasi dari program yang sedang diteliti dan di tempat yang menjadi tempat penelitian. Dengan kata lain, penyedia informasi yang dipilih adalah informasi penting (*Key Informan*).

Dalam penelitian ini, dengan memperhatikan karakteristik informan tidak mungkin ditentukan jumlah informan yang dibutuhkan sejak awal desain penelitian. Oleh karena itu, jumlah kontributor di sini bisa kurang atau lebih tergantung perkembangan lapangan. Informan dalam hal

ini, dapat berupa pelaku program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Desa Kawengen selaku pemerintah, Dinas Sosial, Kepala Desa, dan Komunitas Masyarakat di Desa Kawengen.

1.9.4 Jenis Data

Dalam penelitian kualitatif ini, yang menjadi instrument penelitian adalah peneliti sendiri, selanjutnya menurut Sugiyono (2010:223) *“Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrument penelitian utama. Alasannya adalah bahwa segala sesuatu belum memiliki bentuk pasti. Masalah focus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semua tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan jelas ini, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya”*.

Pada penelitian tentang Implementasi Program Rehabilitasi sosial rumah tidak layak hui di Desa Kawengen ini menggunakan data. Sebagai berikut:

1. Data primer yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data-data yang diperoleh melalui pertanyaan-pertanyaan dari kuesioner, wawancara, dokumentasi, dan observasi/pengamatan secara langsung. Data primer dalam penelitian ini dapat berupa hasil wawancara dan jawaban atas kuesioner para pelaku program yaitu Dinas Sosial Kabupaten Semarang, Kepala Kecamatan Kabupaten Ungaran Timur, Kepala Desa Kawengen, dan masyarakat.
2. Data sekunder merupakan suatu catatan adanya suatu peristiwa yang telah ada sebelumnya berupa catatan dari majalah, surat kabar, maupun dokumen laporan dan beberapa sumber lain yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti. Data sekunder untuk penelitian ini dapat

berupa table, dokumen, maupun laporan dari Dinas Sosial, Kecamatan Ungaran Timur, dan dari Kepala Desa Kawengen yang berguna untuk penelitian ini.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian yang ingin diteliti, meliputi:

a) Wawancara mendalam (*Depth Interview*)

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi lisan melalui percakapan dan tatap muka dengan orang-orang yang dapat mereka berikan informasi.

b) Observasi

Dalam perjalanan penelitian, merupakan upaya mengamati secara langsung objek penelitian guna memperkuat dan mempersuasi hasil wawancara dan fenomena.

c) Dokumentasi

Dengan menemukan artikel berupa artikel di koran, foto, dan laporan yang sesuai dengan masalah yang sedang peneliti pelajari.

d) Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dengan mencari informasi dalam literatur dan buku yang relevan terhadap penelitian yang sedang diteliti.

1.9.6 Analisis Data

Dalam kerangka penelitian, Anda memerlukan sesuatu yang disebut analisis data. sebab kemampuannya adalah sebagai siklus yang mengatur permintaan informasi, memilahnya menjadi unit contoh, klasifikasi dan permintaan mendasar dengan menggunakan resep tertentu. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda (triangulasi). Antara lain: yaitu wawancara, observasi dokumen dan studi pustaka.

Studi kualitatif, data dari berbagai sumber, dan penggunaan berbagai teknik pengumpulan data (triangulasi) secara terus menerus hingga kejenuhan data (Sugiono, 2005:89); Analisis data adalah proses pengambilan dan pengorganisasian secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikannya ke dalam kategori-kategori tertentu, memecahnya menjadi unit-unit, menggabungkannya, menyusunnya menjadi pola-pola, dan memilih serta menarik kesimpulan tentang apa yang penting. untuk belajar. Hasil penelitian dapat dengan mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis dominan (Sugiono, 2005:103) yang dilakukan dengan memperoleh gambaran umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti. Karena pengumpulan data terus dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, maka data yang terkumpul menjadi banyak, sehingga perlu dilakukan analisis taksonomi lagi pada tahap ini. Secara singkat, prosedur analisis penelitian ini ialah sebagai berikut.

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan dan pemusatan pada abstraksi dan penyederhanaan transformasi data kasar dari catatan hasil penelitian di lapangan

- a) Uji data, data disajikan secara tertulis berdasarkan suatu kasus dunia nyata yang salingterkait. Tampilan data (*data display*) digunakan untuk memahami apa yang sedang terjadi.
- b) Verifikasi Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam kegiatan analisis kualitatif.